

DINAMIKA PARTAI POLITIK PADA MASYARAKAT PEDESAAN DI PROVINSI RIAU

Tri Joko Waluyo, Idjang Tjarsono,

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian tentang kehidupan partai politik di desa/kelurahan Air Tiris pada pemilihan umum 1997, 1999, 2004 dan 2009 bertujuan mendeskripsikan wilayah pemilihan umum kelurahan Air Tiris, mendeskripsikan Partai Persatuan Pembangunan dan menjelaskan faktor-faktor pengaruh perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di kelurahan Air Tiris pada pemilihan umum 1997, 1999, 2004, dan 2009. Teori yang mengulas pengaruh kepercayaan keagamaan, identifikasi partai, dan kepemimpinan digunakan untuk menganalisis perolehan suara PPP di kelurahan Air Tiris pada pemilihan umum 1997, 1999, 2004 dan 2009, yang cenderung mengalami penurunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan dua factor utama yang mempengaruhi perolehan suara PPP pada pemilihan umum 1997,1999, 2004 dan 2009 di desa/kelurahan Air Tiris, yaitu : pertama, melonggarnya kaitan antara identitas agama dengan perilaku memilih dalam pemilihan umum, dan kedua, dominasi elit politik.

Kata kunci: Partai politik, agama, pemilihan umum.

PENDAHULUAN

Dinamika partai politik pada masyarakat pedesaan menjadi sorotan yang menarik sebagai salah satu yang utama perwujudan daripada pelaksanaan hak politik masyarakat pedesaan. Dinamika partai politik pada masyarakat pedesaan merupakan gerak kehidupan partai politik secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan partai politik tersebut pada masyarakat pedesaan.

Perkara ini boleh berlaku disebabkan masyarakat pada awal tahun 1998, sudah lepas daripada kongkongan pemerintahan yang terpusat, kepada pemerintahan yang memancar/menyebarkan (*decentralizations*). Keadaan ini memberikan kesan kepada masyarakat untuk memperoleh kembali hak politik yang bebas sesuai dengan keinginan sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pada bahagian ini akan dibincangkan perkara-perkara seperti berikut; sistem politik



dan partai politik, lembaga masyarakat pedesaan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pemilihan umum 1997, 1999, 2004 dan 2009.

Pada negara dengan sistem politik demokratik, perilaku politik warga negara di antaranya dalam bentuk partisipasinya dalam pemilihan umum, yaitu kegiatan memberikan suara kepada calon-calon yang diajukan oleh partai-partai politik, yang diajukan secara periodik untuk mengisi jawatan-jawatan politik pada pemerintahan. Dalam hal ini Powel (1982) mengemukakan sebagai berikut "*participation by citizens in competitive elections is distinctive feature of democratic politics*".

Indonesia sebagai negara demokrasi, pemilihan umum pada masa pemerintahan reformasi, dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat, yaitu anggota-anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD yang selanjutnya membentuk MPR yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD.

Pada masa akhir Orde Baru dan era reformasi telah dilaksanakan pemilihan umum empat kali, yaitu pemilihan umum 1997, 1999, 2004 dan 2009. Pemilihan umum 1997 diikuti oleh tiga partai politik, tiga kali pemilihan umum era reformasi diikuti oleh lebih dari dua puluh partai politik. Pada pemilihan umum 1997, 1999 dan 2004, partai Golkar, masih tampil sebagai partai besar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kemudian berganti nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai besar menyaingi partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kemudian mengumumkan kembali sebagai partai Islam, tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Sementara muncul partai-partai politik baru yang memperoleh suara cukup signifikan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Keadilan, dan Partai Bulan Bintang.

Pada pemilihan umum tahun 2009, Partai Demokrat jauh mengungguli Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sementara partai-partai lainnya relatif tidak mengalami perubahan yang berarti. Partai Persatuan Pembangunan, sebagai partai Islam lama, tetap tidak berganjak, sebagai partai menengah.

Melihat hasil empat kali pemilihan umum di atas, PPP nampak relatif stabil, sebagai partai Islam yang kalah pada pemilihan umum pada masyarakat yang majoriti masyarakatnya beragama Islam. Kekalahan PPP di tingkat nasional dalam empat kali pemilihan umum tersebut ternyata dialami juga dan diikuti sejalan bahkan dengan kecenderungan penurunan yang lebih teruk perolehan suara PPP di kelurahan Air Tiris, kecamatan Kampar, kabupaten Kampar, Riau. Pada empat kali pemilihan umum, tahun 1997, 1999, 2004 dan 2009, PPP di kelurahan Air Tiris mengalami kekalahan yang fluktuatif dan cenderung turun drastik, dari 34 peratus pada pemilihan umum 1997 menjadi hanya 4,7 peratus pada pemilihan umum 2009. Sementara masyarakat kelurahan Air Tiris adalah masyarakat yang 100 peratus memeluk agama Islam, bahkan mendapat julukan sebagai serambi Mekahnya kabupaten Kampar.



PERMASALAHAN PENELITIAN

Masyarakat kelurahan Air Tiris adalah masyarakat yang homogin, sama ada ras, bahasa, agama mahupun adat-istiadat. Hal ini berbeza dengan keadaan masyarakat Indonesia yang terdiri daripada pelbagai suku (kaum), setiap mereka mempunyai budaya masing-masing.

Dalam perspektif budaya masyarakat kelurahan Air Tiris merupakan masyarakat yang homogin, namun dalam kehidupan politik, terutama pilihan parti pada pemilihan umum, masyarakat tersebar dalam pelbagai parti politik, sama ada parti yang berasaskan agama mahupun nasionalis.

Pada masa Orde Baru, Pemerintah Pusat mengiktiraf dasar tentang Parti Politik dan Golongan Karya, tujuannya untuk mengendalikan, mengawal dan menyeragamkan sistem politik dan mencuba untuk meminggirkan parti yang berbasis agama (Islam). Usaha ini mendapat cabaran daripada masyarakat dalam pelbagai bentuk demonstrasi. Demonstrasi terbesar terjadi pada tahun 1998 yang menjatuhkan rezim Orde Baru.

Era Reformasi yang terjadi pada tahun 1999, pihak kerajaan telah meluluskan semua pihak dalam kerajaan untuk membentuk parti politik dengan pelbagai ideologi, termasuk ideologi agama. Namun parti-parti agama tidak serta merta memperoleh sokongan meluas dari masyarakat. Keadaan sudah berubah dalam pelbagai bentuk, sehingga parti agama yang semestinya memperoleh sokongan meluas, ternyata mendapat reaksi (penerimaan atau penolakan) daripada masyarakat. Berdasarkan pada keadaan ini menimbulkan soalan, mengapakah parti-parti politik yang berdasarkan agama (Islam) tidak selalu memperoleh sokongan meluas dan lebih cenderung mengalami kekalahan dalam pemilihan umum.

Kajian ini difokuskan pada masyarakat kelurahan Air Tiris kerana masyarakat Air Tiris seratus peratus menganut agama Islam tetapi parti Islam Parti Persatuan Pembangunan mengalami kekalahan. Oleh itu, permasalahan kajian pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, “faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perolehan suara PPP di kelurahan Air Tiris pada pemilihan umum 1997, 1999, 2004, dan 2009. Pada empat kali pemilihan umum tersebut PPP, sebagai parti Islam, mengalami kekalahan yang semakin teruk, pada pemilihan umum 1997 dan 1999 PPP menjadi parti terbesar kedua, dengan perolehan suara masing-masing 34 % dan 35,11 %, pada pemilihan umum 2004 perolehan suaranya merosot menjadi 11,6 %, sementara pada pemilihan umum 2009 perolehan suaranya merosot lebih tajam dan hanya memperoleh 4,7 %, di mana masyarakatnya seratus peratus sebagai masyarakat Islam yang taat.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan :

1. Mendeskripsikan wilayah pemilihan umum kelurahan Air Tiris.



2. Mendeskripsikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
3. Menjelaskan faktor-faktor pengaruh perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di kelurahan Air Tiris pada pemilihan umum 1997, 1999, 2004, dan 2009.

RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan budaya politik, yaitu norma-norma, keyakinan, sikap dan perilaku masyarakat tentang kehidupan politiknya. Pada penelitian ini yang dikaji adalah norma-norma, keyakinan, sikap dan perilaku masyarakat kelurahan Air Tiris, kecamatan Kampar, kabupaten Kampar, provinsi Riau yang agamis yang diperkirakan menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum.

Fokus penelitian adalah pemilihan umum pada tahun 1997, pemilihan umum pada tahun 1999, pemilihan umum tahun 2004, dan pemilihan umum tahun 2009. Pemilihan umum pertama adalah pemilihan umum terakhir pada masa Orde Baru, rezim yang kemudian jatuh pada tahun 1998. Sedangkan tiga pemilihan umum berikutnya adalah pemilihan umum yang dilaksanakan pada era reformasi.

ULASAN KEPUSTAKAAN

Masyarakat kelurahan Air Tiris merupakan masyarakat yang homogin, seluruh masyarakatnya menganut agama Islam. Namun Partai Persatuan Pembangunan, salah satu partai berideologi agama (Islam) pada empat kali pemilihan umum di atas mengalami kekalahan, bahkan pada dua pemilihan umum terakhir mengalami kekalahan yang teruk. Fenomena ini menarik untuk dianalisa faktor-faktor penyebabnya, dengan menggunakan konsep dan teori yang sesuai, yang mampu mengarahkan kepada memperoleh jawabannya.

Partai Politik

Untuk memahami perilaku politik masyarakat dalam pemilihan umum tidak dapat terlepas daripada membicarakan sistem demokrasi dan partai politik. Para pakar ilmu politik telah sampai pada suatu aksioma bahwa tidak ada sistem politik yang dapat bertahan tanpa partai politik kecuali pada masyarakat tradisional dan beberapa masyarakat transisional. Partai politik telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan dan merupakan alat untuk memperoleh kekuasaan serta untuk memerintah (Ichlasul Amal 1988). Ia merupakan paket dari kehidupan demokrasi (Bert F. Hoselitz 1988).

Dari takrifan dan rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa partai politik pada dasarnya berhubungan dengan perjuangan mendapatkan kekuasaan dalam masyarakat atau kerajaan. Oleh itu, partai politik merupakan organisasi dari orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama, berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat yang mempunyai pandangan yang berbeda.



Partai politik dalam penelitian ini adalah suatu kelompok politik yang memiliki identitas tertentu serta berusaha memenangkan pemilihan umum untuk menempatkan calon-calonnya dalam lembaga-lembaga legislatif dan pemerintahan serta mengabdikan dan melindungi kepentingan nasional. Aktif dalam kegiatan-kegiatan partai politik, dalam masyarakat Air Tiris, dipandang merupakan salah satu bagian dari beribadah.

Fungsi Partai Politik

Berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai politik, pembicaraan selanjutnya difokuskan pada fungsi partai politik. Fungsi partai politik pada dasarnya meliputi; pertama, sosialisasi politik, yaitu membimbing proses penanaman dan penyebaran nilai-nilai dan norma-norma politik. Kedua, partisipasi politik, yaitu memobilisasi warga negara ke dalam kehidupan dan kegiatan politik. Ketiga, rekrutmen politik, yaitu memilih dan menunjuk pejabat-pejabat politik dan pemerintahan. Keempat, komunikasi politik, yaitu menyampaikan informasi, isu, dan gagasan politik. Kelima, artikulasi kepentingan, yaitu membuat dan menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah. Keenam, agregasi kepentingan, yaitu merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kumpulan-kumpulan yang berbeza digabungkan menjadi alternatif-alternatif dasar kerajaan. Dan ketujuh, pembuatan dasar (Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews 1989a).

Di wilayah kelurahan Air Tiris, fungsi-fungsi partai politik tersebut, sampai pada pemilihan umum 1997, hampir seluruhnya dilakukan oleh pemerintah melalui pelbagai sarana. Hal ini terjadi terutama, setelah diterapkannya sistem "floating mass" yang membatasi ruang gerak partai politik hanya sampai tingkat kabupaten/kotamadya pada pemerintahan Orde Baru. Kegiatan partai politik di kelurahan atau desa terjadi pada masa sebelum Orde Baru dan sesudah rezim Orde Baru berakhir, sehingga fungsi-fungsi partai politik lebih nampak berjalan. Pada masa sebelum Orde Baru, kelurahan Air Tiris termasuk desa yang mayoritas warganya mengidentifikasikan diri kepada partai-partai politik Islam, seperti Masyumi, PERTI dan NU.

Dalam masa-masa menjelang pemilihan umum, fungsi-fungsi partai politik ini lebih diwakili oleh kelompok pemimpin lokal, baik pemimpin formal maupun informal, yang mengatasnamakan partai tertentu. Oleh itu, sebenarnya merekalah yang lebih dominan dalam membawa warganya untuk menentukan pilihan dalam setiap pemilihan umum.

Sistem Kepartaian

Pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk partisipasi politik masyarakat, sangat ditentukan oleh sistem kepartaian yang berlaku. Sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia pada praktiknya ialah sistem multi partai,

yaitu suatu sistem politik dengan lebih dari dua partai politik. Namun sejak pemerintahan Orde Baru sistem multi partai ini cenderung mengarah kepada suatu sistem yang oleh Almond disebut sebagai sistem “satu partai dominan”. Pada mulanya sistem kepartaian ini merupakan sistem banyak partai, tetapi dalam perkembangannya ada satu partai yang selalu memenangkan mayoritas suara dengan jauh meninggalkan yang lain sehingga walaupun pemilihan umum yang kompetitif selalu diadakan, hasilnya suara majoriti selalu masuk ke dalam partai yang dominan itu (Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews 1989b).

Penerapan ideology “Pembangunanisme” dalam sistem kepartaian di Indonesia berjalan cukup lancar. Pemilihan umum pertama masa orde baru diadakan pada tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan satu Golongan Karya atau 10 organisasi peserta pemilihan raya, yaitu: PNI, NU, Parmusi, PSII, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Murba, Perti, dan Golongan Karya. Pada pemilihan umum ini Golkar muncul sebagai pemenang mutlak dengan meraih 62,8 peratus suara, menyusul kemudian NU dengan 18,4 peratus suara, sedangkan 8 partai politik lainnya masing-masing memperoleh suara di bawah 7 peratus (Alfian 1978).

Dalam posisi seperti itulah berlangsung fusi partai yang melahirkan PPP pada tanggal 5 Januari 1973, yaitu fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Fusi partai ini selanjutnya dikukuhkan dengan dikeluarkannya undang-undang No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dan ini berarti memantapkan eksistensi ketiga organisasi politik tersebut, yakni: PPP, Golkar, PDI dalam sistem kepartaian di Indonesia.

Penyederhanaan lain, yaitu penyederhanaan ideologi, dilaksanakan dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 3 tahun 1985, perubahan Undang Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golongan Karya. Undang Undang baru ini menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi partai politik dan Golongan Karya. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi partai politik dan Golongan Karya, maka kekhususan partai politik dan Golongan Karya nampak pada pendekatan dan penekanan dalam pemikiran untuk memecahkan masalah-masalah yang luas yang dihadapi dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan hal ini akan tercermin dalam program masing-masing (Sapto Ajie 1985).

Perilaku Politik

Untuk memahami perilaku politik masyarakat kelurahan Air Tiris akan diarahkan dan mengacu pada pola kultur politik masyarakat Jawa. Bila mengikuti pola aliran yang dikemukakan Geertz bahwa kaum santri adalah *who takes as their man pattern way of life orientation, a set of beliefs values and expressive symbols based primarily on Islamic doctrine* (Afan Gaffar 1992b), maka masyarakat Air Tiris dapat dikatakan bahwa kaum santri merupakan bagian terbesar atau majoriti. Mereka, secara amnya, berusaha melandasi kehidupannya pada ajaran Islam. Tingkah laku sosial politik mereka mencerminkan ajaran agama Islam. Mereka mempercayai semangat ukhuwah Islamiyah, dan salah satu

perwujudan ukhuwah tersebut adalah bergabung dalam wujud partai atau organisasi-organisasi sosial.

Sejalan dengan kondisi masyarakat Air Tiris tersebut di depan, dapat dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik mereka. **Pertama** kepercayaan keagamaan. Masyarakat santri, termasuk masyarakat Air Tiris, akan mendukung dan memilih partai politik yang secara ideologi berdasarkan Islam. Mereka memandang bahwa agama Islam memberikan bimbingan secara individual dan juga kepada para pemimpin yang meliputi seluruh aspek kehidupan, dan tidak mengenal pemisahan agama dan politik atau negara. Dalam hal ini **Liddle** mengemukakan: *“They (umat Islam) believe that their religion provides guidance to the individual adherent and to the leaders of society in all areas of life. There is, therefore, in principle no separation of “church and state”.*

Dengan demikian, pada masyarakat santri, hubungan antara agama dan politik sangat erat, bahkan tidak terpisahkan. Bagi santri, memeluk Islam secara sempurna berarti juga harus mendukung organisasi sosial dan politik yang berusaha memperjuangkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Hal ini lebih menjelaskan bahwa faktor agama merupakan salah satu dasar identifikasi seseorang dengan partai politik tertentu, sehingga kaum santri akan mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik yang mencerminkan nilai-nilai Islam, atau paling tidak partai yang berusaha mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.

Faktor **kedua** yang dapat menjelaskan tingkah laku politik masyarakat pedesaan adalah identifikasi partai. Konsep identifikasi partai ini sangat penting karena merupakan punca utama seseorang dalam menentukan pilihan dalam pemilihan umum. Identifikasi partai berhubungan erat dengan kejiwaan seseorang dalam mengkaitkan dirinya dengan partai politik atau organisasi politik tertentu. Hubungan kejiwaan tersebut telah berkembang sejak awal dalam kehidupannya melalui proses sosialisasi politik, yaitu suatu proses penyebaran nilai-nilai dan norma-norma dari generasi ke generasi. Peranan para perantara seperti orang tua, saudara-saudara kandung, kawan-kawan sebaya, sekolah dan organisasi politik sangat penting dalam mengolah dan menyebarkan nilai-nilai dan norma-norma politik dalam masyarakat.

Dalam hal ini, Donald K. Emmerson (1992), dalam studinya mengenai elite Indonesia, mendapatkan proses sosialisasi politik yang berbeda antara elite santri dan abangan. Emmerson menunjukkan jalur-jalur yang berbeza yang dilalui oleh masing-masing kelompok elite selama masa-masa perkembangan anak-anak dan berikut masa dewasa. Kaum abangan didorong terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mencerminkan dunia Jawa Hindu dalam organisasi-organisasi nasionalis sekuler, sementara itu kaum santri cenderung bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang mencerminkan dunia Islam, memasuki pesantren atau organisasi sosial politik Islam. Melalui proses ini identifikasi dengan partai politik tertentu berkembang secara intensif, walaupun dalam beberapa kasus mengalami kemunduran.



Bagaimanapun, perilaku masyarakat, khususnya masyarakat desa akan sangat dipengaruhi dan bahkan ditentukan oleh sekelompok kecil pemimpin atau elite dalam masyarakat tersebut, merupakan faktor **ketiga** dan merupakan faktor utama, yang mempengaruhi masyarakat desa dalam menentukan pilihan dalam pemilihan umum. Dalam hal ini Gaetano Mosca (1989) menyatakan “dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama, yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama itu”.

Pola kepemimpinan masyarakat pedesaan Indonesia seperti ini dapat lebih jelas diterangkan dengan mengikuti konsep kewibawaan karismatik Weber. Menurut Max Weber (1992), landasan kepemimpinan karismatik adalah kepercayaan bahwa pemimpin memiliki ketetapan hati dan kualiti khas yang berasal dari dirinya yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, seperti misalnya kekuatan supranatural.

Di dalam masyarakat pedesaan, tipe kepemimpinan seperti ini terbagi menjadi dua kelompok pemimpin, yaitu kelompok pemimpin formal seperti kepala desa atau lurah dan para pembantunya, dan kelompok pemimpin informal yang terdiri dari terutama para pemuka agama dan adat. Dalam banyak kes, para pemimpin informal memainkan peranan yang sangat berarti dalam mengarahkan masyarakat melebihi peranan pemimpin formal.

Ketiga faktor di atas, kepercayaan keagamaan, identifikasi partai, dan kepemimpinan kiranya cukup untuk menganalisis perolehan suara PPP di kelurahan Air Tiris pada pemilihan umum 1997, 1999, 2004 dan 2009, yang cenderung mengalami penurunan.

METODE DAN LOKASI PENELITIAN

Metode dan Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan daripada penelitian ini dipandang tepat dengan menggunakan metode deskriptif-eksplanatif dan pendekatan kualitatif. Metode ini merupakan suatu model penelitian yang disebut studi hubungan, yaitu hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas dan variabel terikat.

Kaedah Kajian

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui penelaahan dokumentasi, antara lain: laporan-laporan, aturan-aturan, berita media massa, dan telaah referensi. Selain itu dilakukan wawancara dan pengamatan terhadap beberapa informan yang terdiri dari para fungsionaris partai-partai politik, PPP, GOLKAR, PDIP,

PAN, PKS, Partai Demokrat, dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang terdiri dari para pimpinan partai, dan juga tingkat di kabupaten.

Disamping itu, wawancara juga dilakukan terhadap sejumlah pemuka masyarakat kelurahan, baik Kepala Kelurahan dan para pembantunya, mahupun para pemuka masyarakat yang lain terutama para pemuka agama yang mendominasi masyarakat kelurahan Air Tiris. Data yang telah diperollah dianalisis dengan menggunakan analisa campuran antara metode induktif dan metode deduktif, dengan berpedoman pada kerangka teori dan kecenderungan data yang diperoleh, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Dengan demikian maka analisa yang digunakan cenderung pada bentuk analisa kualitatif.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisa campuran antara metode induktif dan metode deduktif, dengan berpedoman pada kerangka teori dan kecenderungan data yang diperoleh, baik data kuantitatif mahupun data kualitatif. Dengan demikian maka analisa yang digunakan cenderung pada bentuk analisa kualitatif.

Kawasan Kajian

Kawasan penelitian, seperti telah disebut di depan, adalah seluruh wilayah kelurahan Air Tiris, kecamatan Kampar, kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Kawasan penelitian ini dipilih kerana memiliki keunikan yang menarik sehubungan dengan perkembangan perolehan suara PPP dari pemilihan raya ke pemilihan raya. Hal ini berhubungan dengan penurunan perolehan suara PPP dari pemira ke pemira.

DESKRIPSI WILAYAH KELURAHAN AIR TIRIS

Kondisi Geografi dan Demografi

Kelurahan Air Tiris merupakan satu-satunya Kelurahan di Kecamatan Kampar dari 30 Desa atau Kelurahan di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Kelurahan ini terletak kurang lebih 50 km di sebelah barat kota Pekanbaru, ibu kota provinsi Riau dan 10 km di sebelah timur Bangkinang, ibu kota kabupaten Kampar, yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten.

Kelurahan Air Tiris merupakan Kelurahan dengan pemilih terbanyak, di kecamatan Kampar, pada pemilihan umum tahun 2009, serta penduduknya seratus peratus beragama Islam. Sehingga bulan April 2010 penduduk kelurahan Air Tiris 5.418 orang terdiri dari 2.613 laki-laki dan 2.805 perempuan. Jumlah tersebut terdiri dari 2.100 orang berumur 0-16 tahun dan 3.318 orang berumur 17 tahun ke atas.



Ditinjau dari mata pencaharian pula, sebahagian besar masyarakat kelurahan Air Tiris adalah petani. Selain petani ada juga penduduk yang bekerja pada bidang jasa, pegawai kerajaan, pegawai bersara, buruh dan swasta.

Pemerintahan

Berdasarkan UU No. 2 tahun 1999 pasal 1 huruf n, Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan. Nama Air Tiris berasal dari cerita zaman dahulu kala. Dalam suatu kisah, seorang pencari ikan yang bernama Panglima Khotib menangkap ikan dengan menombak seekor ikan pada sungai kecil yang tidak mengalir. Peristiwa itu, menangkap ikan dengan menombak, membawa Panglima Khotib sampai pada suatu tempat dekat negeri tetangga yaitu Johor Malaysia.

Sampai saat ini sungai kecil yang tidak berhulu dan tidak berhilir tersebut dijadikan nama sebuah kelurahan yaitu kelurahan Air Tiris. Nama Air Tiris dulunya merupakan sebuah kenagarian yang berada di bawah sebuah kecamatan. Kemudian nama kenagarian Air Tiris yang terdiri dari beberapa kampung ini berubah lagi menjadi beberapa desa muda, yaitu beberapa kampung digabung menjadi sebuah pedesaan.

Sedangkan nama desa Air Tiris tetap ada sebagai ibu kota kecamatan Kampar. Berdasarkan UU No. 5 tahun 1979, desa Air Tiris sebagai ibu kota kecamatan Kampar, terdiri dari dua (2) Rukun Kampung (RK) yaitu RK Tanjung Belit dan RK Pasar Baru, kemudian statusnya menjadi kelurahan, yaitu kelurahan Air Tiris.

Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999, bahwa kepala pemerintahan di kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang bertanggung jawab kepada bupati melalui camat. Untuk membantu kepala kelurahan dalam menjalankan roda pemerintahan, dibentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) melalui keputusan kepala kelurahan dengan persetujuan camat dan mendapat pengesahan dari bupati.

Kondisi Sosial Politik

Masyarakat kelurahan Air Tiris yang seratus peratus beragama Islam merupakan basis dari organisasi kemasyarakatan religius seperti Muhammadiyah dan PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiah). Pada masa Orde Baru masyarakat kelurahan Air Tiris sering disebut masyarakat yang tergolong fanatik. Hal ini ditandai dengan gigihnya masyarakat memegang teguh nilai-nilai yang diyakininya baik dan benar. Dengan demikian nilai-nilai baharu yang datang tidak mudah mempengaruhi masyarakat.

Pada masa lalu wilayah kelurahan Air Tiris dapat dikatakan sebagai basis Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini disebabkan oleh terutama pamor H. Muhammad Amin, seorang perintis kemerdekaan yang kebetulan pimpinan PPP Sebahagian besar pengurus Muhammadiyah dan PERTI menjadi pengurus dan pendukung PPP. Kondisi ini juga disebabkan oleh perilaku para birokrat atau

kader Golkar yang kurang berkenan di hati masyarakat kelurahan Air Tiris. Namun keadaan menjadi berubah pada pemilihan umum era reformasi.

Sebagai gambaran, pada pemilihan umum 1992 suara PPP menang tipis 53 %, Golkar 45 % dan PDI 2 %. Pada pemilihan umum 1997 Golkar menang dengan mendapat perolehan suara mayoritas yaitu 64 %, PPP 34% dan PDI 2%. Pada pemilihan umum 1999 PAN berada pada urutan pertama perolehan suara yaitu 43,84%, PPP 35,11%, Golkar 11,19%, PBB, PK, PDIP dan lainnya memperoleh suara 9,5%. Pada pemilihan umum 2004 PBR berada pada urutan pertama perolehan suara yaitu 41,00%, PPP 11,6%, Golkar 10,9%, PBB 8,7 % , PKS 9,3 % , PAN 9,7 % dan PDIP 3,0 %. Pada pemilihan umum 2009 partai Golkar kembali berada pada urutan pertama perolehan suara yaitu 43,7%, PPP 4,7%, PBB 3,3 % , PKS 4,41 % , PAN 16,7 % dan PDIP 3,7 %.

Sekalipun terjadi perbezaan dalam memilih partai, para pendukung partai baik yang menang mahupun yang kalah tetap terjalin hubungan yang harmonis. Dalam upaya merebut simpati masyarakat, berbagai kegiatan diadakan oleh masing-masing partai. Contoh nyata adalah Partai Bintang Reformasi yang melaksanakan tabligh akbar dengan mendatangkan mubaligh kondang yang juga ketua umum PBR yakni K.H. Zainuddin MZ. Gerak jalan santai dilaksanakan oleh Golkar. Pada dua kegiatan tersebut disambut baik oleh para konstituennya dengan cara diundi, aman, tertib, tanpa saling memburukkan.

Kondisi Sosial Keagamaan dan Sarana Pendidikan

Pada dasarnya kondisi sosial keagamaan di kelurahan Air Tiris terkenal sebagai masyarakat yang fanatik dan kuat memegang nilai-nilai agama dan adat istiadat. Namun dua dasawarsa terakhir ini kondisi kian dirasakan semakin meluntur. Hal ini disebabkan karena letak geografis kelurahan Air Tiris yang berada di jalan negara Pekanbaru-Sumatra Barat dan berada di pusat kota kecamatan. Hal ini secara tidak langsung tentu dengan mudah menerima transformasi budaya yang datang. Selain itu pengaruh media elektronik juga ikut mempengaruhi karakteristik pribadi masyarakat kelurahan Air Tiris. Namun demikian, pada hakikatnya kultur sosial masyarakat kelurahan Air Tiris berada antara dua budaya desa dan kota. Efek utama perubahan yang dapat dilihat adalah hampir hilangnya budaya kerja sama atau gotong-royong dalam masyarakat Kelurahan Air Tiris.

Berkaitan dengan pendidikan, kelurahan Air Tiris termasuk daerah yang memiliki lembaga pendidikan yang cukup lengkap. Lembaga pendidikan yang terdapat di kelurahan Air Tiris meliputi lembaga pendidikan agama dan umum. Sarana pendidikan dan ibadah di kelurahan Air Tiris sebagai berikut : memiliki 2 buah TK, 3 buah SD, 6 buah MDA. Terdapat satu buah pondok pesantren, 2 buah SLTP, 2 buah SLTA, 2 buah Lembaga Kursus dan 17 buah TPA. Sedangkan sarana ibadah terdapat 6 buah masjid dan 18 buah surau. Lembaga pendidikan agama cukup mendominasi, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Air Tiris merupakan masyarakat religius. Jika dikaitkan dengan dinamika politik, maka kondisi ini menguntungkan bagi partai politik yang berbasiskan keislaman.

Elit Partai Politik

Pada dasarnya di kelurahan Air Tiris terdapat enam partai yang memiliki elit politik cukup mapan yaitu Golkar, PPP, PAN, PBB, PDIP, dan PBR. Para elit politik tersebut memiliki pelbagai latar belakang yang berbeza, baik dari segi pendidikan, status sosial mahupun latar belakang partainya. Dari 14 orang elit politik yang terdapat di kelurahan Air Tiris, 3 orang merupakan fungsionaris partai Golkar, 2 orang fungsionaris PBR, 3 orang fungsionaris PAN, 1 orang fungsionaris PPP, 1 orang fungsionaris PDIP, dan 3 orang fungsionaris PBB. Secara ekonomi, tokoh-tokoh ini termasuk ekonomi menengah ke atas dengan berbagai latar belakang pekerjaan, seperti petani, pedagang, pegawai negeri maupun pensiunan pegawai negeri. Sementara dari segi latar belakang pendidikan, rata-rata tingkat SLTA dan Sarjana Strata Satu, dengan pendidikan agama rata-rata mengenyam pendidikan pondok pesantren.

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) : KARAKTERISTIK DAN DINAMIKANYA

Terbentuknya Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Konfederasi dalam kelompok Persatuan Pembangunan, bagaimanapun, masih mengalami banyak kendala, walaupun pendekatan secara intensif antara partai-partai yang bergabung telah dilakukan. Pada mulanya, PSII secara tegas menyatakan penolakan terhadap fusi partai-partai. H.M. Ibrahim, Ketua PSII, menganggap bahwa hasil pengelompokan di DPR yang berbentuk konfederasi tersebut sudah maksimal. Di samping itu, PSII khawatir, apabila melakukan fusi ke dalam satu partai politik, PSII hanya akan memperoleh posisi yang inferior, mengingat partai politik Islam lainnya, NU misalnya, lebih besar. Dengan demikian, kemungkinan PSII menempati jabatan penting dalam partai sangatlah kecil. Tetapi pendirian ini berubah setelah pimpinan PSII jatuh ke tangan H. Anwar Cokroaminoto yang memperoleh “restu” dari pihak kerajaan.

Sikap NU, dalam kongresnya di Surabaya tanggal 20-25 Desember 1971, menolak fusi partai-partai Islam menjadi satu partai, tetapi kemudian keputusan ini dicabut dan NU menuruti fusi seperti yang diinginkan pemerintah. Sementara itu, bagi Parmusi dan PERTI, nampaknya, fusi seperti inilah yang diinginkan umat Islam sebenarnya, untuk menyatukan gerak langkah dalam perjuangan politik. Umat Islam pada mulanya hanya memiliki Masyumi sebagai satu-satunya wadah perjuangan politik, sebelum PSII keluar dan berdiri pada tahun 1947 yang kemudian disusul keluarnya NU pada tahun 1952.

Melalui pelbagai pertemuan antar partai-partai Islam dalam rangka upaya fusi, akhirnya pada tanggal 5 Januari 1973, hari Jum'at, keempat partai politik Islam yang melakukan konfederasi dalam kelompok Persatuan Pembangunan menyatakan memfusikan diri dalam satu partai politik Islam dalam rapat presidium Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi. Nama konfederasi disepakati



menjadi nama partai hasil fusi tersebut, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, disingkat PPP. Fusi partai-partai Islam ini diwujudkan dalam bentuk deklarasi yang ditanda tangani oleh pimpinan masing-masing partai sebagai berikut : K.H. Idham Chalid (NU), M.S. Mintaredja (PARMUSI), K.H. Masykur (NU), Rusli Halil (PERTI), dan H. Anwar Cokroaminoto (PSII).

Karakteristik Dasar PPP

Nahdlatul Ulama (NU)

NU didirikan di kampung Kertopaten, Surabaya, 31 Januari 1926 oleh para ulama penganut Ahlussunnah wal Jama'ah (Siradjudin Abas 1983), salah satu dari empat madzhab yang ada. Kemunculannya dipengaruhi oleh kondisi kemasyarakatan dan keagamaan yang berkembang di mana-mana (Chairul Anam 1985). Para ulama yang menganut madzhab ini mempunyai pandangan tentang perlunya persatuan di antara mereka.

Kondisi kemasyarakatan dan keagamaan yang mempengaruhi munculnya NU, di antaranya, bahwa pada akhir abad ke 19 timbul gerakan Pembaharuan Islam yang dipelopori oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Mohammad Abduh, muridnya serta para Pembaharu Islam lainnya (**Taufik Abdullah**), yang memandang akan perlunya mengarahkan kepada Ajaran Islam yang sebenarnya, yakni kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengaruh gerakan ini di Indonesia adalah terbentuknya organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 (**William Liddle**).

Massa pendukung NU berpusat di Pesantren, sehingga karakter kepemimpinan di lingkungan Pesantren yang sangat paternalistik sangat mempengaruhi karakter kepemimpinan dalam struktur organisasi NU. Posisi Kyai sangat sentral di dalam NU, para kyai berada pada lembaga syuriah yang menekuni bidang keagamaan, dan segala keputusan NU harus mendapatkan persetujuan dari para Kyai di lembaga Syuriah ini.

Pada awal berdirinya, NU bergerak dalam bidang sosial keagamaan, dan pendidikan, aspirasi politiknya disalurkan lewat Masyumi. Tetapi sejak NU keluar dari Masyumi tahun 1952, NU menyatakan diri sebagai Partai Politik. Partai NU dalam mengarahkan kegiatan politiknya lebih bertumpu pada pertimbangan hukum fiqh yang pada kenyataannya banyak mewarnai keputusan-keputusan politik yang diambil. Pertimbangan Agama, khususnya pertimbangan hukum-hukum fiqh, merupakan sumber daya kritis yang melekat pada NU. Bila yang dihadapi hal yang bertentangan dengan hukum fiqh, NU akan berusaha keras menentangnya.

Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)

Setelah bergabung ke dalam PPP, Parmusi mengubah dirinya menjadi organisasi kemasyarakatan dengan nama Muslimin Indonesia (MI). Pada awal berdirinya, Parmusi didukung oleh 16 organisasi kemasyarakatan Islam, yang ingin melanjutkan kembali perjuangan Masyumi. Ketika Parmusi berubah menjadi MI sebagai organisasi kemasyarakatan, maka 16 organisasi kemasyarakatan yang tadinya mendukung menjadi organisasi kemasyarakatan yang kedudukannya sama dengan MI, dan tidak lagi memiliki hubungan yang berkaitan dengan penyaluran aspirasi politik, karena Parmusi memang bukan lagi partai politik (K.E. Ward 1970).

Berbeda dengan NU yang memiliki basis massa dan sumber kepemimpinan di pondok-pondok pesantren, basis massa MI banyak terdapat di perkotaan dengan sumber kepemimpinan pada para politisi Islam Modernis perkotaan yang lebih banyak berpendidikan umum. Pola pemikirannya lebih mengutamakan rasionalitas dan profesionalisme. Basis massa dan sumber kepemimpinan MI ini tidak jauh berbeda dengan basis massa dan sumber kepemimpinan Masyumi.

Namun demikian, orientasi politik MI berbeda dengan orientasi politik Masyumi. Perbedaan ini ada kaitannya dengan karakteristik kepemimpinan MI yang berbeda dengan karakteristik kepemimpinan Masyumi. Para pemimpin Masyumi memperlihatkan kesan sebagai kaum fundamentalis, teguh pada pendirian dan memiliki komitmen yang kuat terhadap umat dan ide-ide yang diyakininya (Fachry Ali dan Iqbal A. Saimima 1981). Tetapi tidak demikian halnya dengan para pemimpin MI. Para pemimpin MI sifatnya lebih akomodatif, serta kurang memiliki komitmen yang kuat terhadap umat dan ide-ide yang diyakininya. Hal ini berkaitan dengan proses rekrutmen para pemimpin MI yang memang diambil dari para pemimpin yang lebih akomodatif terhadap pemerintah.

Kepimpinan Mohammad Rum dan Hasbullah, sebagai ketua umum dan Sekretaris Jendral Parmusi, yang terpilih dalam Kongres Parmusi I, tidak diakui oleh kerajaan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya mantan pucuk pimpinan Masyumi yang duduk di dalamnya. Nampaknya kerajaan tidak mengizinkan para mantan pimpinan Masyumi memainkan peranan penting dalam partai politik. Pimpinan Masyumi akhirnya jatuh kepada Djarnawi Hadikusumo dan kawan-kawan melalui SK Presiden No. 70 tahun 1968.

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

Partai ini didirikan di kota Solo, Jawa Tengah, pada tahun 1912. Bermula dari Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911. Partai ini sering membanggakan dirinya sebagai partai tertua di Indonesia, dikenal sebagai cikal bakal tumbuhnya partai politik di Indonesia. Aktifiti politik secara terang-terangan dinyatakan pada tahun 1916, pada tahun 1921 mengubah namanya menjadi Partai Syarikat Islam, dan menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia pada tahun 1930.

Pada mulanya massa pendukung Syarikat Islam terdiri dari berbagai lapisan dan golongan masyarakat (Rusli Karim 1983). Massa pendukung seperti ini ternyata tidak terus berlanjut, anggota-anggota yang semula sangat setia banyak yang melepaskan diri. Kalangan pendukung yang beraliran Marxis mendirikan Partai Komunis Indonesia, dan yang beraliran Nasionalis mendirikan Partai Nasionalis Indonesia. Kumpulan penyokong dari kalangan Islam sendiri pada akhirnya juga terpecah selari dengan munculnya organisasi atau partai Islam baru. Setelah Indonesia merdeka, Kumpulan penyokong Syarikat Islam lebih banyak berasal dari kalangan Islam perkotaan yang terdiri dari kalangan pengusaha. SI tidak mempermasalahkan apakah tradisional atau reformis, yang penting adanya persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam.

Kepelbagaian lapisan penyokong SI juga tercermin dalam wujud kepimpinannya yang berasal dari berbagai kalangan. Sejak berdirinya sampai sekarang pemimpin SI lebih banyak berasal dari kalangan intelektual perkotaan dan para pengusaha, namun kepemimpinan SI ini lebih banyak didominasi oleh keluarga H.O.S. Tjokroaminoto. Sehingga organisasi ini lebih identik dengan organisasi keluarga H.O.S. Tjokroaminoto (Deliar Noer 1982).

Orientasi politiknya, dari waktu ke waktu mengalami perubahan-perubahan. Walaupun dalam kurun waktu tertentu SI nampak melakukan politik akomodatif, namun sikap-sikap tegas dalam suatu kondisi tertentu dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat, misalnya, pada waktu SI menjadi anggota “volksraad”, sebuah lembaga legislatif zaman penjajahan Belanda, SI bersikap tegas dan pernah mengambil sikap non-kooperatif, tidak bersedia duduk di dalam volksraad. Pada masa pemerintahan Orde Baru, SI juga cenderung bersikap akomodatif kecuali ketika dipimpin oleh H.M.Ch. Ibrahim. Kekecualian ini nampak pada saat SI tidak menyetujui dimasukkannya aliran kepercayaan di dalam GBHN serta ditetapkannya P-4 menjadi Tap. MPR.

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)

Partai politik Perti berasal dari organisasi tradisional Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang berpusat di Bukittinggi, Sumatera Barat. Organisasi ini didirikan di suatu pesantren terkenal di Candung, dekat Bukittinggi, pada tanggal 20 Mei 1930. Ia merupakan benteng pertahanan golongan tradisional Islam terhadap penyebaran paham dan gerakan modern (Deliar Noer 1987). Pada saat berdirinya, Perti bertujuan mempersatukan madrasah-madrasah yang menganut faham Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam i'tiqad dan madzab Syafi'i, namun kemudian meluas ke bidang-bidang lain, seperti sosial, ekonomi, dan akhirnya juga bidang politik ketika ia berkembang menjadi partai politik Perti, pada tanggal 22 Nopember 1945.

Massa penyokong Perti banyak berpusat pada penganut faham Ahlussunnah Wal Jama'ah, yang berpusat di madrasah-madrasah. Dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam menganut faham Ahlussunnah Wal Jama'ah dan pandangannya terhadap gerakan Islam Modern, Perti memiliki kesamaan dengan

NU. Namun, berkaitan dengan empat madzab, Perti hanya menganut satu madzab, yakni madzab Syafi'i.

Corak kepemimpinan Partai, seperti halnya di NU, bersifat paternalistik, yang menempatkan Ulama pada posisi yang tinggi. Pemahaman keagamaan yang cenderung bersifat taqlid menjadikan sifat paternalistik kepemimpinannya menonjol. Massa pendukung Perti berpusat di madrasah-madrasah yang bercorak syafi'iyah.

Sementara itu, orientasi politik Perti, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru, lebih bersifat akomodatif, terutama hal-hal yang tidak berhubung kait dengan hukum Syar'i dalam Islam. Walaupun Perti merupakan unsur terkecil pendukung PPP, namun merupakan unsur yang cukup setia. Bila dua unsur lainnya, NU dan SI, masing-masing sudah menyatakan tidak memiliki aspirasi politik dengan PPP, namun perti, seperti juga MI, masih menyatakan menyalurkan aspirasinya kepada PPP.

Bila dilihat karakteristik dasar PPP yang terurai dari keempat unsur fusinya, dapat diperkirakan sejauh mana kemampuan masing-masing unsur untuk tetap mempertahankan fusi. Perbedaan klasik antara NU dan MI merupakan sumber konflik laten, walaupun perkembangan di luar partai juga merupakan kendala tuntasnya fusi. Sementara itu satu-satunya pengikat masing-masing unsur dalam fusi adalah motivasi ke-Islaman.

Perkembangan PPP

PPP sebagai Partai Tunggal Islam

Nampaknya, keharusan fusi menjadi satu partai bagi empat partai Islam ini merupakan suatu keterpaksaan yang sebenarnya tidak diinginkan. PPP yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Islam, serta berlambang tanda gambar Ka'bah ini langsung dihadang oleh masalah-masalah dalaman yang berat. Dalam perjalanannya, PPP nampaknya padat dengan konflik dalaman yang dengan mudah diketahui oleh masyarakat luas. Sumber konflik di antaranya adalah perselisihan antar unsur dalam penyusunan daftar calon anggota DPR, pertentangan tentang jumlah calon masing-masing unsur, apakah mengikuti status quo pada pemilu-pemilu sebelumnya atautkah perlu perubahan, perebutan posisi pimpinan komisi di DPR. Konflik demikian lebih diperparah oleh usaha penyelesaian konflik yang tidak rasional, misalnya pencoretan beberapa nama calon anggota DPR yang berbobot, dan tidak demokratisnya proses penentuan kepemimpinan partai (Panji Masyarakat 1983). Pemimpin PPP, H. Mintardja dan J. Naro, keduanya dari unsur Parmusi, tidak lahir melalui Mukhtar Partai. Mereka muncul melalui jalur "saling pengertian" elite politik dari keempat unsur dalam partai, yang kemudian mendapat restu dari "atas".

Selari dengan semakin pelbagai pentingnya kepentingan di kalangan elite partai, pemerintah menerapkan strategi politik massa mengambang yang pada dasarnya semakin mengasingkan partai politik dari massa di pedesaan. Tanda gambar partai



politik hanya sampai di tingkat kecamatan, dengan demikian akar-akar yang mempertautkan partai dengan massa, yang 80 peratus lebih berada di kawasan pedesaan, menjadi terputus. Partai tidak mampu menjalankan fungsi sosialisasi dan komunikasi pada tingkat bawah, aktifitas partai memusat di sekitar fungsi-fungsi parlemen.

Konflik internal yang tidak pernah dapat terselesaikan secara tuntas merupakan sumber utama semakin melemahnya partai Islam ini. Harapan akan terwujudnya solidariti Islam yang dimotori oleh empat unsur yang melakukan fusi tidak pernah terwujud, bahkan masing-masing unsur berusaha memperkuat posisinya untuk menindas atau menghadapi unsur yang lain. Dari sini nampak bahwa fusi terwujud dalam tingkah laku politik para elite politik.

Sudah diduga oleh para pengamat bahwa PPP, partai tunggal Islam ini, tidak akan mengalami perkembangan yang berarti pada pilihan-pemilihan umum pasca pemilihan umum 1971. Sekalipun pada pemilihan umum 1977 PPP berhasil menambah 5 kursi dari 94 menjadi 99, tetapi pada pemilihan umum 1982 kembali pada posisi semula, yaitu 94 kursi. Hasil pilihan-pemilihan umum tersebut jelas tidak memberikan peluang bagi partai Islam ini untuk mengembangkan diri. Bahkan kepercayaan pemerintah menyertakan partai ini dalam kabinet pun hilang. Dengan kemenangan mutlak Golkar, kekuatan politik yang disokong oleh kerajaan, partai Islam PPP ini seakan-akan menjadi tidak berarti dan tidak diperhitungkan.

Dalam Sidang Umum MPR 1977, Partai Islam PPP berusaha berjuang untuk menunjukkan dan mempertahankan karakteristiknya. PPP berusaha mencegah dimasukkannya aliran kepercayaan di dalam GBHN dan ditetapkannya P-4 sebagai ketetapan MPR, yang dipersiapkan oleh pemerintah. Dalam suasana hangat perdebatan dalam MPR, Partai Islam ini terpaksa memilih jalan "Walk Out" (WO) terhadap materi perdebatan yang nampaknya memang ingin dipaksakan. Di sini nampak ketidakberdayaan Partai Islam ini dalam parlemen, karena pada akhirnya aliran kepercayaan tetap masuk dalam GBHN dan P-4 menjadi salah satu ketetapan MPR. Kegagalan Partai Islam dalam mempertahankan pendiriannya, pada gilirannya justru merupakan sumber perdebatan dalaman yang semakin melemahkan partai.

Menghadapi pemilihan umum 1982, Partai Islam PPP tidak menampakkan kesiapan yang lebih mantap, walaupun mengalami peningkatan perolehan kursi pada pemilu 1977. Bahkan konflik intern lama kambuh kembali, yaitu perselisihan antara unsur NU dan unsur MI mengenai penyusunan jumlah dan nomor urut calon legislatif. Di bawah kepemimpinan H.J. Naro, unsur MI lebih berani melangkah untuk sekaligus menyudutkan unsur NU. Bahkan NU pernah mengancam memboikot pemilihan umum. Sementara kekuatan politik lainnya melakukan usaha konsolidasi, PPP, partai tunggal Islam justru dilanda konflik yang sedang menuju klimaksnya antara unsur NU dengan unsur MI (Abu Jihan 1984).



Dalam suasana retak di dalam seperti inilah partai tunggal Islam, PPP, menyongsong pemilihan umum 1982. Di tengah kehidupan partai yang “megap-megap” itu pulalah PPP memasuki gelanggang kempen. Terjadinya bentrok fisik ketika Golkar mengadakan kempen “akbar” banyak dipandang merupakan salah satu bukti betapa semaraknya suasana kempen. Bentrok fisik tersebut disebut sebagai peristiwa “Lapangan Banteng”. Menurut pemberitaan pers, sesuai dengan versi pihak keselamatan, punca kerusuhan tersebut adalah sekumpulan orang dari PPP. Diterjemahkan secara bebas lalu dikatakan bahwa kerusuhan itu bermotifkan agama. Sejauh mana tuduhan terhadap agama (Islam) itu dapat dipertanggungjawabkan, namun dari sini umat Islam “tercoreng” yang kesekian kalinya, dan kejadian ini pulalah yang dijadikan dalih untuk memutuskan hubungan agama dengan politik. Ideologi dibersihkan dari campur tangan agama (Rusli Karim 1982a).

Demikianlah, akhirnya, seperti diduga banyak pengamat, bahwa PPP tidak akan mengalami kemajuan, dan terbukti pada pemilihan umum tahun 1982 PPP kehilangan 5 kursinya kembali menjdai 94. Selama hampir 10 tahun, PPP, partai tunggal Islam, senantiasa diwarnai konflik, dan tidak mengalami perkembangan yang bererti.

PPP Melepaskan Azas Islam

Pemira ketiga pada masa Orde Baru dilaksanakan 4 Mei 1982. PPP, partai tunggal Islam, memperoleh 27,78 peratus dengan 94 kerusi di DPR, sementara Golkar, kekuatan politik sokongan kerajaan, meraih 64,34 peratus suara dengan 246 kerusi di DPR (Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin 1988). Hasil pemilihan umum di atas melapangkan jalan bagi kerajaan untuk memaksakan ambisi politiknya, dan apapun yang dikehendaki akan terlaksana.

Kelanjutan ambisi politik pemerintah Orde Baru didengungkan kembali melalui pidato kenegaraan Presiden Suharto pada tanggal 16 Agustus 1982, tiga bulan setelah kemenangan mutlak Golkar dalam pemilihan umum. Dalam pidatonya itu Presiden menyatakan bahwa pemerintahan telah memberikan “lampu hijau” dan sekaligus mengeluarkan “uneg-uneg”-nya dalam rangka pembubaran partai Islam (Panji Masyarakat 1982a).

Dalam keadaan tidak berdaya, PPP, partai tunggal Islam dihadapkan kepada pilihan yang paling pahit. Nampaknya, demi kelangsungan partai, PPP segera menyatakan menerima seruan penghilangan azas ciri (Islam) dan menegaskan bahwa satu-satunya azas PPP adalah Pancasila. Nampaknya PPP menyadari betul bahwa, bagaimanapun, kehendak pemerintah tersebut tidak mungkin dapat dihindari. Dengan demikian, sebenarnya, bahwa PPP, sebagai partai tunggal Islam, telah membubarkan diri.

Bagaimanapun, penerimaan PPP terhadap azas tunggal Pancasila tidak meredakan konflik. Bahkan dapat diperkirakan, isu azas tunggal ini justru menjadi sumber konflik baru antara mereka yang pro dan yang kontra, atau saling bersaing

untuk menampilkan diri sesuai dengan azas “baru” tersebut. Sampai pada Mukhtamar I PPP, Agustus 1984, konflik dalam tubuh PPP belum juga reda. Mukhtamar tersebut menghasilkan mengangkat kembali J. Naro sebagai pimpinan puncak PPP yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan unsur NU.

Sejak Mukhtamar yang tidak memuaskan tersebut, NU cenderung merenungkan kembali peranannya dalam partai selama ini, dan setelah mempertimbangkan bahwa politik J. Naro tidak mungkin di-“jinakkan”, maka melalui mesyuarat agung di Situbondo, akhir 1984, NU memproklamkan diri kembali ke khittah (garis perjuangan) 1926, yaitu kembali sebagai Jam’iyyah Islam dan sama sekali melepaskan dunia politik serta memutuskan sama sekali hubungannya dengan PPP (Rusli Karim 1982b). Keputusan mukhtamar NU tersebut disosialisasikan melalui fatwa Rois ‘Aam NU KH. Acmad Siddiq yang berisi :”warga NU tidak wajib mencoblos PPP, tidak haram mencoblos Golkar dan PDI”. Fatwa ini kemudian disebar-luaskan dalam “buku kuning”, NU dan Pemilu, yang disusun oleh A. Zundi Muhdlor dan diberi pengantar oleh H. Syaiful Mujab, wakil ketua PBNU. Selain berisi fatwa, buku setebal 50 halaman itu juga memuat kembali intisari keputusan mesyuarat agung tentang kembali ke “khittah 1926” berikut uraian mengenai “perlakuan PPP” yang dianggap tidak adil terhadap NU. Munculnya fatwa ini ternyata mempunyai dampak yang cukup jauh, dan tak lama kemudian berbagai pesantren, basis cultural NU, dan banyak para pimpinan NU membawa massanya menyatakan sikap meninggalkan PPP, dan berbondong-bondong pindah ke Golkar dan PDI (Syamsuddin Haris 1987).

Bersamaan dengan penyebaran sikap penggembosan NU menyusul hasil Mukhtamar NU di Situbondo akhir 1984, ketentuan mengenai penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas partai politik mengarah kepada keputusan final. Dalam proses selanjutnya, ketentuan mengenai hal tersebut, secara yuridis formal, dituangkan dalam bentuk undang-undang No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Dengan demikian, maka eksistensi PPP sebagai partai tunggal Islam secara resmi telah diakhiri.

Sementara pihak memandang bahwa ketentuan asas tunggal pancasila tersebut bererti lenyapnya symbol-simbol Islam dalam politik berbangsa dan bernegara yang pada hakekatnya merupakan usaha eliminasi politik atau depolitisasi dari Islam. Namun Ahmad Syafi’i Maarif menegaskan bahwa apapun strategi depolitisasi Islam atau de-Islamisasi politik tidak akan pernah berhasil (Panji Masyarakat 1985a). Sedangkan Nurholish Madjid memandang bahwa Islamisasi di Indonesia akan lebih cepat jika dilakukan melalui deislamisasi partai politik di satu pihak dan di pihak lain melalui depolitisasi organisasi-organisasi Islam (Arif Mudatsir 1984). Dijelaskan lebih lanjut bahwa strategi di atas dalam rangka mengembangkan inklusivisme Islam, agar kelompok atau golongan partaisan tertentu dapat terbebas dari hambatan psikologis dalam mengadopsi Islam secara tuntas (Panji Masyarakat 1985b). Pandangan varetif tentang hubungan Islam dengan politik (partai politik) tersebut mengantarkan PPP memasuki pemilihan umum 1987.

Partai Persatuan Pembangunan, PPP, yang sejak tahun 1985 secara resmi bukan partai Islam lagi, disertai problematika yang semakin kompleks, memasuki pemilihan umum 1987. Dan, seperti diperkirakan oleh banyak pengamat bahwa PPP akan mengalami kemunduran dan kemerosotan perolehan suara pada pemilihan umum tersebut. Terbukti, pada pemilihan raya 1987 suara PPP merosot tajam, hanya 15,25 peratus. Dari 94 kursi di DPR pada tahun 1982, merosot menjadi hanya memperoleh 61 kursi di DPR hasil pemira 1987.

Menjelang pemilihan umum 1992, yakni pada tanggal 28-31 Agustus 1989, PPP menyelenggarakan mesyuarat agung yang ke II setelah 17 tahun di pentas politik Orde Baru. Walaupun J. Naro tetap berusaha keras untuk menduduki jabatan ketua am untuk periode berikutnya, namun pada akhirnya Ismail Hasan Metareum, SH yang terpilih sebagai Ketua Umum yang baru menggantikan J. Naro.

Terpilihnya Ismail Hasan Metareum sebagai Ketua Umum PPP yang baru telah menimbulkan optimisme di kalangan elite PPP akan adanya peluang meningkatkan perolehan suara setidaknya sama dengan perolehan suara pada pemilihan umum 1982. Dengan terpilihnya Ismail Hasan Metareum, masyarakat NU yang pada pemilihan umum 1987 membelot ke Golkar dan PDI diharapkan kembali mendukung dan memilih PPP pada pemilihan umum 1992. Harapan ini tidak berlebihan mengingat walaupun Ismail Hasan Metareum berasal dari unsur MI tetapi memperoleh dukungan luas termasuk kelompok NU yang diwakili oleh Imam Sofwan (Syamsuddin Haris 1991).

Ketika hasil pemilihan umum 1992 selesai diumumkan dan ketiga OPP telah sepakat menerima, ternyata PPP tidak mengalami kenaikan yang berarti. Sementara di Jawa kursi PPP bertambah 7 kursi, tambahan satu kursi dari Jawa Barat, 3 kursi dari Jawa Tengah dan 3 kursi dari Jawa Timur. Tetapi berkurang 6 kursi di wilayah pemilihan Sumatera (Tri Sukses 1992).

PPP Kembali Menggunakan Azas Islam

Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 menyusul demonstrasi besar-besaran, terutama oleh mahasiswa, di seluruh kota di Indonesia menuntut perubahan. Peristiwa ini menandai awal transisi demokrasi yang kemudian dikenal dengan "reformasi". Partai politik yang pada masa Orde Baru berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, pada masa reformasi lebih bebas yang memunculkan partai-partai yang berasaskan agama dan asas-asas lain, kecuali asas komunisme..

Faktor penting yang kemudian mengubah dan mempengaruhi dinamika dan struktur kepartaian pada masa ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Amandemen UUD 1945 memberikan kontribusi sangat penting bagi partai politik dalam menata dan mewarnai demokrasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dan amandemen UUD 1945 tersebut menjadi factor penentu yang

mengubah dan membentuk struktur kepartaian dan dinamika kehidupan politik yang berlangsung saat ini.

Munculnya peraturan tentang partai politik mendorong terbentuknya beragam partai politik, sama ada dari segi jumlah mahupun ideology politik. Masa setelah kejatuhan Soeharto ini terjadi pembebasan politik aliran, dengan sedikit penyimpangan, untuk tampil secara terbuka dalam panggung politik. Berbagai aliran politik yang pernah tampil pada masa awal kemerdekaan tampil kembali dalam panggung politik. Partai dengan jubah agama, etnis dan ideology nasionalis lahir kembali. Sedikit penyimpangan atau anomaly adalah munculnya partai yang tidak sepenuhnya mengekspresikan aliran secara telanjang, tetapi lebih bercorak pseudo aliran seperti yang terlihat pada PKB dan PAN. Kedua partai tersebut lahir dari rahim aliran, yaitu NU dan Muhammadiyah, tetapi tidak sepenuhnya menggunakan simbol agama dan juga tidak sepenuhnya meninggalkannya.

Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik menjadikan kehidupan partai politik pada era reformasi dipenuhi oleh partai yang lahir dengan mengambil inspirasi kepartaian pada masa pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, partai yang dikonstruksi masa Orde Baru, dan partai-partai baru yang tidak memiliki preseden kesejarahan sebelumnya. Hampir semua aliran ideology dan partai yang pernah hidup pada masa sebelumnya, kecuali komunis, hadir kembali dan bersaing dengan partai-partai yang memang sama sekali baru.

Partai Persatuan Pembangunan yang dideklarasikan pada 5 Januari 1973, bersama Partai Demokrasi Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lahir sebagai akibat politik fusi yang ditempuh oleh Orde Baru. PPP merupakan fusi dari partai-partai yang berada pada kelompok spiritual-material, yaitu partai yang menekankan pembangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek material, yang meliputi NU, Parmusi, PSII dan Perti. Sejak partai-partai tersebut melebur dalam PPP, konflik internal antar unsure pembentuk partai terus menyelimuti partai, yang berakibat, salah satunya, keluarnya NU dari PPP pada tahun 1985.

Pada awalnya PPP berideologi Islam moderat. Partai ini sering disebut sebagai “rumah besar umat Islam”, karena berbagai unsure Islam politik terfasilitasi di PPP. Ketika zaman Orde Baru, PPP menjadi articulator perjuangan Islam politik dan tidak jarang mengambil sikap oposisional. PPP kritis terhadap isu-isu yang dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti misalnya masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN, Undang-Undang Perkawinan, pelembagaan P4, dan azas tunggal Pancasila (Azis, 2006). PPP sebagai partai Islam sempat mengalami dilemma ketika Orde Baru memaksakan azas tunggal Pancasila bagi semua kekuatan politik dan organisasi kemasyarakatan. PPP akhirnya mengganti azas Islam dengan azas Pancasila dan lambang Ka’bah diganti dengan lambang Bintang segi lima.

Pada era reformasi, PPP kembali menggunakan azas Islam dan lambang Ka’bah, tetapi juga sekaligus kehilangan monopolinya sebagai satu-satunya partai Islam. Unsur-unsur yang dulu membentuk PPP kemudian membentuk partai tersendiri (Amir 2003). Namun demikian, kemudian konflik kembali melanda PPP dengan lahirnya PPP Reformasi yang kemudian berganti nama menjadi Partai

Bintang Reformasi (PBR). Dari sisi perjuangan ideology, pada amandemen UUD 1945 (1999-2002) PPP berusaha memasukkan ideology Islam sekaligus menolak aliran kepercayaan dan komunisme melalui perubahan pasal 29 (Mandan 2009, Subekti 2008).

FAKTOR PENGARUH PEROLEHAN SUARA PPP PADA PEMILIHAN UMUM 1997, 1999, 2004 DAN 2009 DI KELURAHAN AIR TIRIS

Menyimak analisis perkembangan perolehan suara PPP pada pemilihan umum 1997, 1999, 2004 dan 2009 di atas dapat dilihat faktor pengaruh perolehan suara PPP pada masing-masing pemilihan umum, sama ada PPP mengalami kemenangan maupun PPP mengalami kekalahan. Dari kondisi tersebut, kemudian, dapat dilihat faktor pengaruh penurunan perolehan suara PPP. PPP di desa/kelurahan Air Tiris mengalami perkembangan perolehan suara yang memiliki kekhasan tersendiri. Pada pemilihan umum 1997 dan 1999, PPP sebagai partai Islam dengan lambang gambar Bintang kemudian Ka'bah mampu meraih suara masing-masing 34,00 peratus dan 35,11 peratus. Pada pemilihan umum 2004 PPP di desa/kelurahan Air Tiris menurun drastis, hanya meraih 11,6 peratus suara, dan mengalami penurunan lebih tragis dengan hanya meraih suara 4,7 peratus.

Melalui pengamatan yang cermat didapatkan bahwa kegiatan keagamaan masyarakat desa/kelurahan Air Tiris cukup intensif dengan fasilitas simbol keagamaan, misalnya : Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, Madrasah dan sebagainya, memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa/kelurahan Air Tiris dapat dikategorikan sebagai masyarakat santri. Dalam kaitannya dengan pilihan dalam pemilihan umum, masyarakat desa/kelurahan Air Tiris lebih mengidentifikasikan diri pada partai-partai Islam. Sosialisasi politik melalui lembaga-lembaga keagamaan pada awalnya mampu menjaga identifikasi tersebut dari pemilihan umum ke pemilihan umum. Seperti masyarakat desa umumnya, masyarakat desa terbagi menjadi sebagian kecil para pemuka masyarakat yang biasa disebut kelompok elite berhadapan dengan sebagian besar masyarakat yang biasa disebut kelompok massa, dengan kelompok elite didominasi oleh para tokoh informal. Melalui pola hubungan yang sedikit banyak bersifat patron client, perubahan-perubahan kelompok elite, baik secara individu maupun secara kelompok, akan berpengaruh pada perubahan masyarakat pada umumnya, termasuk kaitannya dengan pilihan dalam pemilihan umum.

Dalam kasus pemilihan umum 1997, masyarakat desa/kelurahan Air Tiris yang telah terbentuk menjadi masyarakat santri dan telah mengenal dan menjatuhkan pilihan pada partai-partai Islam sejak pemilihan umums 1955, serta didukung oleh kekompakan kelompok elite yang didominasi para tokoh informal, PPP menjadi pemenang kedua setelah Golkar, dengan meraih suara yang cukup meyakinkan sebesar 34,00%. Pada pemilihan umum 1999 telah terjadi perubahan system kepartaian dimana muncul 48 partai politik peserta pemilihan umum. Muncul partai-partai politik Islam baru, seperti PAN, PK, PKB, PBB, yang menjadikan PPP bukan lagi satu-satunya partai Islam. Paradigma lama, di mana



seluruh pegawai negeri, tentara, polisi dan para pejabat wajib mendukung dan memilih Golkar, pada pemilihan umum 1999 tidak berlaku lagi, bahkan seluruh pegawai negeri, tentara, dan polisi tidak boleh menjadi anggota partai politik, sementara para pejabat bebas bergabung atau tidak dengan partai politik. Para tokohpun kemudian tersebar bergabung dengan partai-partai baru, terutama partai-partai Islam. Perubahan system yang terjadi menjelang pemilihan umum 1999 ini telah menjadikan para tokoh masyarakat desa/kelurahan Air Tiris mengalami anomaly, mengalami perubahan sikap yang menjadikan partai Golkar mengalami kemerosotan drastic dan munculnya pemenang partai Islam baru yaitu PAN. Sementara suara PPP tetap terjaga bahkan mengalami peningkatan walau sangat sedikit. Perubahan sikap kelompok elite seperti ini ternyata diikuti oleh sebagian besar masyarakat desa/kelurahan Air Tiris dan membuyarkan identifikasi masyarakat terhadap partai Golkar sebagai partai pengayom dan pembangun yang telah puluhan tahun terbentuk. Sementara partai politik Islam baru, PAN, berjaya. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa sesungguhnya sebutan masyarakat santri pada masyarakat desa/kelurahan Air Tiris pada dasarnya menjadi lebih nyata. Kondisi menjelang pemilihan umum 2004 mengalami perubahan, dengan berbagai alasan para fungsionaris PPP desa/kelurahan Air Tiris mengundurkan diri dari PPP dan bergabung dengan PBR (Partai Bintang Reformasi), partai pecahan dari PPP. Hal tersebut mengakibatkan pecahnya masyarakat, khususnya pada kelompok elite, yang kemudian diikuti oleh masyarakat. Pada pemilihan umum 2004, partai Islam baru PBR memperoleh kemenangan dengan 41,00 peratus suara, sementara PPP mengalami penurunan drastic hanya meraih 11,6 peratus suara, partai Golkar mengalami penurunan lagi dengan hanya meraih 10,9 peratus suara. Partai-partai Islam baru yang lain, PBB dan PKS mengalami kenaikan yang cukup berarti. Partai pemenang pemilihan umum 1999 mengalami kemerosotan tajam, hanya meraih 9,7 peratus, jauh di bawah perolehan suara pada pemilihan umum 1999, 43,84 peratus suara. Pemilihan umum 2009 di desa/kelurahan Air Tiris menunjukkan fenomena yang mengejutkan . Kalau pemilihan umum 1999 dan 2004 dimenangi oleh partai-partai Islam, sebaliknya pada pemilihan umum 2009 lebih didominasi partai-partai nasionalis. Partai-partai nasionalis, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDIP masing-masing memperoleh 43,7 peratus, 8,36 peratus dan 3,7 peratus yang berarti perolehan suara lebih dari 50 peratus. Sementara-partai-partai Islam secara keseluruhan memperoleh kurang dari 50 peratus, dengan PBR dan PAN memperoleh suara terbesar, masing-masing 17,3 peratus dan 16,7 peratus. Hal ini terjadi setelah terjadi perubahan system di mana masyarakat pemilih dapat memilih langsung calon legislative yang terpampang gambarnya pada kertas suara. Di samping itu, calon legislative yang terjun langsung dalam kampanye atau sosialisasi diri tidak sulit untuk menyerahkan bantuan langsung, terutama saat-saat menjelang dan pada masa kampanye, baik berupa dana maupun bahan-bahan bangunan untuk pembangunan, terutama pembangunan masjid dan mushalla. Calon legislative yang paling mampu melaksanakan hal itu memperoleh sambutan masyarakat yang sepadan. Dan pada pemilihan umum 2009 ini partai Golkar dan partai Demokrat yang paling banyak secara cerdas menggunakan kesempatan.

KESIMPULAN



Perolehan suara PPP 34,00 peratus dan 35,11 peratus, sebagai pemenang kedua pada pemilihan umum 1997 dan 1999 di desa/kelurahan Air Tiris dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, identifikasi masyarakat santri desa/kelurahan Air Tiris terhadap partai-partai Islam telah mengakar sangat kuat. Sosialisasi nilai-nilai ajaran Islam dari generasi melalui berbagai sarana, sama ada organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah mahupun melalui lembaga-lembaga pengajian atau Majelis Ta'lim dan pondok pesantren, telah menghasilkan wujud masyarakat santri, yakni masyarakat yang berusaha mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sikap memilih partai-partai Islam dalam pemilihan umum.

Pengaruh bimbingan para pemuka masyarakat atau kelompok elite desa/kelurahan. Para pemuka masyarakat di desa/kelurahan Air Tiris memiliki kelebihan-kelebihan yang memperkuat posisi mereka sebagai elite, antara lain, memiliki status penguasaan terhadap nilai-nilai ajaran Islam dan memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik. Hal demikian memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap mereka yang sedikit banyak, hubungan antara elite-massa, berpola sebagai hubungan "patron-client". Sampai pada pemilihan umum 1999, kelompok elite desa/kelurahan Air Tiris masih memperlihatkan kekompakannya menjatuhkan pilihan pada partai Islam PPP.

Strategi rekrutmen dan strategi kempen PPP desa/kelurahan Air Tiris yang sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat. PPP berhasil merekrut para tokoh masyarakat berpengaruh untuk menduduki jabatan fungsionaris, sama ada tingkat Kecamatan mahupun tingkat Desa/Kelurahan. Dalam kempen dinyatakan bahwa PPP merupakan satu-satunya partai Islam yang menyalurkan aspirasi ummat Islam, sudah sepantasnya masyarakat Islam mendukung dan menjatuhkan pilihannya.

Perolehan suara PPP 11,6 peratus, mengalami penurunan cukup tajam, pada pemilihan umum 2004 di desa/kelurahan Air Tiris dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, identifikasi masyarakat santri desa/kelurahan Air Tiris terhadap partai-partai Islam telah mengakar sangat kuat. Sosialisasi nilai-nilai ajaran Islam dari generasi melalui berbagai sarana, sama ada organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah mahupun melalui lembaga-lembaga pengajian atau Majelis Ta'lim dan pondok pesantren, telah menghasilkan wujud masyarakat santri, yakni masyarakat yang berusaha mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sikap memilih partai-partai Islam dalam pemilihan umum. Namun suara pemilihan umum tidak lagi mutlak untuk PPP, namun untuk partai-partai Islam lainnya, seperti PAN, PBB dan PKS.

Pengaruh bimbingan para pemuka masyarakat atau kelompok elite desa/kelurahan. Para pemuka masyarakat di desa/kelurahan Air Tiris memiliki kelebihan-kelebihan yang memperkuat posisi mereka sebagai elite, antara lain, memiliki status penguasaan terhadap nilai-nilai ajaran Islam dan memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik. Hal demikian memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap mereka yang sedikit banyak, hubungan antara elite-massa, berpola sebagai hubungan "patron-client". Namun pada pemilihan umum 2004, kelompok elite desa/kelurahan Air Tiris tidak lagi memperlihatkan kekompakannya menjatuhkan pilihan pada partai Islam PPP. Para elite mulai tersebar, tidak lagi hanya monopoli PPP, melainkan juga untuk PBR, PAN, PKS dan PBB.



Strategi rekrutmen dan strategi kempen PPP desa/kelurahan Air Tiris yang sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat. PPP tidak lagi sepenuhnya mampu merekrut para tokoh masyarakat berpengaruh untuk menduduki jabatan fungsionaris, sama ada tingkat Kecamatan mahupun tingkat Desa/Kelurahan. Dalam kempen tidak lagi boleh dinyatakan bahwa PPP merupakan satu-satunya partai Islam. Masyarakat ummat Islam, mendukung dan menjatuhkan pilihannya menyebar ke banyak partai politik Islam..

Perolehan suara PPP 4,7 peratus, mengalami penurunan lebih tajam lagi, pada pemilihan umum 2009 di desa/kelurahan Air Tiris dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, identifikasi masyarakat santri desa/kelurahan Air Tiris terhadap partai-partai Islam yang telah mengakar sangat kuat mulai memudar. Sosialisasi nilai-nilai ajaran Islam dari generasi melalui berbagai sarana, sama ada organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah mahupun melalui lembaga-lembaga pengajian atau Majelis Ta'lim dan pondok pesantren, telah menghasilkan wujud masyarakat santri, yakni masyarakat yang berusaha mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sikap memilih partai-partai Islam dalam pemilihan umum. Namun suara pemilihan umum tidak lagi banyak dipengaruhi oleh ideology agama melainkan lebih pada partai yang lebih kongkrit memberikan kemanfaatan. Dalam hal ini partai Golkar dan partai Demokrat lebih mampu leluasa dalam memberikan kemanfaatan. Golkar dan PD memenangkan pemilihan umum 2009.

Pengaruh bimbingan para pemuka masyarakat atau kelompok elite desa/kelurahan. Para pemuka masyarakat di desa/kelurahan Air Tiris memiliki kelebihan-kelebihan yang memperkuat posisi mereka sebagai elite, antara lain, memiliki status penguasaan terhadap nilai-nilai ajaran Islam dan memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik. Hal demikian memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap mereka yang sedikit banyak, hubungan antara elite-massa, berpola sebagai hubungan "patron-client". Pada pemilihan umum 2009, kelompok elite desa/kelurahan Air Tiris masih memperlihatkan kekompakannya menjatuhkan pilihan pada partai politik. PPP ternyata telah ditinggalkan. Pilihan lebih didasarkan pada kemampuan partai dalam memberikan kemanfaatan nyata, partai Golkar dan partai Demokrat..

Strategi rekrutmen dan strategi kempen PPP desa/kelurahan Air Tiris yang sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat. PPP telah gagal merekrut para tokoh masyarakat berpengaruh untuk menduduki jabatan fungsionaris, sama ada tingkat Kecamatan mahupun tingkat Desa/Kelurahan. Di samping itu, dalam kempen tidak lagi boleh dinyatakan bahwa PPP merupakan satu-satunya partai Islam. Masyarakat ummat Islam, mendukung dan menjatuhkan pilihannya menyebar ke banyak partai politik Islam dan bahkan memenangkan partai Golkar..

Dari kasus empat pemilihan umum 1997, 1999, 2004 dan 2009 di atas menunjukkan adanya kecenderungan, bahwa masyarakat Islam, masyarakat santri tidak selalu menjatuhkan pilihan atau mengidentifikasikan diri pada partai Islam. Berkaitan dengan partai-partai politik peserta pemilihan umum, masyarakat Islam, masyarakat santri tidak selalu menjatuhkan pilihan atau mengidentifikasikan diri pada partai Islam, khususnya PPP. Di samping, itu sikap dan arah gerak warga masyarakat desa, termasuk sikap menentukan pilihan pada pemilihan umum, sangat dipengaruhi oleh para pemimpin mereka, dalam kerangka pola hubungan



yang paternalistic. Kekompakan para pemuka masyarakat membawa kekompakan massa, sebaliknya terpecahnya para pemuka masyarakat akan mengakibatkan terpecahnya massa. Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, pilihan masyarakat terhadap partai tertentu lebih ditentukan oleh kemana para pemuka masyarakat tersebut menjatuhkan pilihan. Dari sini ditemukan dua factor utama yang mempengaruhi perolehan suara PPP pada pemilihan umum 1997,1999, 2004 dan 2009 di desa/kelurahan Air Tiris, yaitu : pertama, melonggarnya kaitan antara identitas agama dengan perilaku memilih dalam pemilihan umum, dan kedua, dominasi elit politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Jihan (ed.). 1984. *PPP, NU, dan MI Gejolak Wadah Politik Islam*. Jakarta. Integrita Press.
- Afan Gaffar. 1992. *Javanese Voters A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (pnyt.). 1988. *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta. CV. Rajawali Press dan AIPI.
- Alfian. 1978. *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Amir, Zainal Abidin. 2003. *Peta Islam Politik Pasca Suharto*. Jakarta. LP3ES.
- Azis, Abdul. 2006. *Politik Islam Politik : Pergulatan Ideologis PPP menjadi Partai Islam*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Bert F. Hoselitz. 1988. *Panduan Dasar Ilmu Ilmu Sosial*. Terj. Jakarta: Rajawali Press.
- Chairul Anam. 1985. *Perkembangan dan Pertumbuhan Nahdlatul Ulama*. Solo: Jatayu.
- Deliar Noer. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Deliar Noer. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Donald K. Emerson. 1976. *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*. Ithaca: Cornell University Press.



- Fachry Ali dan Iqbal A. Saimima. 1981. Merosotnya Aliran dalam Partai Persatuan Pembangunan. *Prisma*. No. 12.
- K.E. Ward. 1970. *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Mandan, Arief Mudatsir. 2009. Krisis Ideologi : Catatan tentang Ideologi Politik Kaum Santri Studi Kasus Penerapan Ideologi Islam PPP. Jakarta. Pustaka Indonesia Satu.
- M. Rusli Karim. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- M. Rusli Karim. 1992. *Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru*. Yogyakarta: PT. Media Widya Mandala.
- Mohtar Mas'oeed dan Colin MacAndrews. 1989. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Panji Masyarakat. 1985.
- R. William Liddle. 1992. Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- R. Williams Liddle, tanpa tahun. Politics and Culture in Indonesia, p.20, The Ohio State University.
- S. Sapto Ajie (pnyt.). 1985. *UU RI No.1 Tahun 1985 tentang Pemilu*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Siradjudin Abas. 1983. *I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Syamsudin Haris. 1991. *PPP dan Politik Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Subekti, Valina Singka. 2008. Menyusun Konstitusi Transisi. Jakarta. Rajawali Press.
- Taufik Abdullah. 1981. Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Tri Sukses. 1992. 10 Jun.